ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 6/2014 tentang desa dengan tujuan meningkatkan kemandirian desa dalam rangka mengelola sumber daya yang dimiliki desa. Termasuk di dalamnya, Dana Desa. Pemberian dana desa yang begitu besar tentunya menuntut adanya tanggung jawab yang besar pula oleh pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik di Desa Pangkatrejo pada tahun anggaran 2018 beserta pengawasan dari pihak terkait. Penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga mampu memberikan gambaran akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pangkatrejo secara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik cukup baik. Namun, masih ada masalah terkait akuntabilitas pengelolaan dana itu sendiri. Tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah baik, namun dari segi penatausahaan masih terjadi monopoli oleh sekretaris desa. Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan, Pemerintah Desa hanya fokus terhadap akuntabilitas secara vertikal dan mengabaikan akuntabilitas secara horizontal. Dari segi pengawasan, BPKP jawa timur terus berupaya dalam mengawal dana desa baik melalui pembuatan sistem keuangan, pembinaan dan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, pengelolaan keuangan desa, Pengawasan keuangan desa

ABSTRACT

The Government of Indonesia issued Law 6/2014 on Villages, aiming to increase village independence in managing the resources owned by the village. It includes Dana Desa. Large amount of Dana Desa provision certainly needs requires a great responsibility by the village government. The purpose of this research is to know the accountability of village fund management for physical development in Pangkatrejo Village in the 2018 fiscal year along with supervision of Dana Desa from related parties. This research uses a qualitative method with a case study approach so as to provide an overview of the accountability of financial management in Pangkatrejo Village in depth. The results of this research are village financial management is quite good. But there are still problems related to the accountability of fund management itself. Planning and implementation are good, but in terms of administration there is still a monopoly by the village secretary. For accountability and reporting, the Village Government only focuses on vertical accountability and ignores horizontal accountabiliy. In terms of supervision, the East Java BPKP make serious efforts to ovsrsee Dana Desa through the creation of a financial system, guidance and continue evaluation the implementation.

Keywords: Accountability, Dana Desa, village financial management, supervision, supervision of village fund